BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 135 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 - 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah dengan ditetapkannya indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan
b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada di bawahnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 – 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang.....

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 Nomor 1) ;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 – 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener meriah .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bener Meriah.

5. Kinerja.....

5. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bener Meriah .
8. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah .

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

1. Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana tersebut dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bener Meriah untuk:

a. menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018–2022 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

BAB III.....

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bener Meriah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener meriah .

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 22 Oktober 2018 M
13 Shafar 1440 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

BUPATI BENER MERIAH

BARKAWI

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal : 23 Oktober 2018 M
14 Shafar 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

SEKRETARIAT DAERAH BENER MERIAH

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR : 135

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 135 TAHUN 2018
TANGGAL: 22 OKTOBER 2018 M
13 SHAFAR 1440 H

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran		Indikator		kondisi Awal awal RPJM	Target Indikator					Kondisi akhir RPJM	OPD
		Outcome	Satuan		2018	2019	2020	2021	2022		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi 1. Mewujudkan pelaksanaan Dinul Islam secara kaffah											
Tujuan : Penguatan tatanan kehidupan beragama, kerukunan, dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan tuntunan agama secara paripurna (kâffah) dalam upaya semangat keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah SWT sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.											
1	Tersedianya sarana dan prasarana keagamaan yang layak	Indeks Kepuasan Layanan masyarakat	score	n/a	5	6	7	8	9	9	SETDAKAB, SETWAN,
		jumlah Qanun (Prolegda)	Jumlah	n/a	5	5	5	5	5	5	SETDAKAB, SETWAN,
		Regulasi Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah	1	2	5	7	10	10	10	DINSYAR, SETMPU, BAPPEDA
		Ruang Kelas Baik	%	n/a	50	60	70	80	90	90	DINPEN DAYAH, DPUPERKIM, DISDIK
		Rumah Ibadah Yang menenuhi SPM	%	n/a	50	60	70	80	90	90	DPUPERKIM, DINSYAR, DINPEN DAYAH,
2	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia dibidang keagamaan	Angka Partisipasi TPA	%	0	5	10	15	20	25	30	DINSYAR, MPU, DINPEN DAYAH
		ASN Khatam Qur'an 2x /Tahun	%	n/a	5	10	15	20	25	25	SEMUA OPD, ,
		Iman Kampung Hafizh Qur'an	Jumlah	0	10	50	100	150	233	233	DINSYAR, MPU, DINPEN DAYAH
		Pejabat Ess II hafizh 10 Juz	%	n/a	5	10	15	20	25	25	SEMUA OPD, ,
		Pejabat Ess III dan IV Hafizh 5 Juz	%	n/a	5	10	15	20	25	25	SEMUA OPD, ,
		Rasio Tenaga Keagamaan per 1.000	%	0	5	10	15	20	25	30	DINSYAR, MPU, DINPEN DAYAH
3	Peningkatan dan Pengelolaan Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) Tepat Sasaran	Angka Kemiskinan	%	21,43	20	19	16	14	10	11	BAITUL MAAL, ,
		Indeks Kepuasan Layanan masyarakat	score	n/a	5	6	7	8	9	9	SETDAKAB, SETWAN, , BAITUL MAAL, BPKA, DISKOMINFO
		jumlah Qanun (Prolegda)	jumlah	n/a	5	5	5	5	5	5	SETDAKAB, SETWAN, SETBAIRULMAAL
		Penerimaan Zakat	Rp	8M	10	15	20	22	25	25	BAITUL MAAL,BPKA ,
4	Penegakan syariat yang ramah bagi tatanan kehidupan bermasyarakat	Indeks Kepuasan Layanan masyarakat	score	n/a	5	6	7	8	9	9	SETDAKAB, SETWAN,
		Jumlah Pelanggaran Syariat	Kasus	30 (2016)	25	20	15	10	5	5	DINSYAR, SATPOLPPWH,
		jumlah Qanun (Prolegda)	Jumlah	n/a	5	5	5	5	5	5	SETDAKAB, SETWAN,
		Regulasi Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah	1	2	5	7	10	10	10	BAPPEDA, DINSYAR, SETMPU
5	Pengembangan destinasi wisata islami dan wisata halal	Jumlah Event Dinul islam skala kabupaten	Jumlah	n/a	5	6	7	8	9		DINSYAR, SETDAKAB, DISPARPORA
		Jumlah Event Seni Budaya di Bener Meriah	jumlah	n/a	2	3	4	5	6		DISPARPORA, DIKJAR, MPD,MAG
		Jumlah sanggar Seni dan Budaya	jumlah	n/a	2	4	6	8	10		DISPARPORA, DIKJAR, MPD, MAG
		PDRB Sektor Pariwisata	%	0,43	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,60	DISPARPORA, DIKJAR, MPD,MAG, SETDAKAB,
		Pendapatan Perkapita	Rp/Tahun	21	22	23	24	25	26	26	DISPARPORA, DIKJAR, MPD,MAG, BPPKD, SETDAKAB,
		Situs Budaya Yg dibina	Jumlah	n/a	2	5	10	15	20	20	DISPARPORA, DIKJAR, MPD,MAG
		Wisatawan Asing	Jumlah		100	500	1,000	1,500	2,000		DISPARPORA, DIKJAR, MPD,MAG, SETDAKAB,
		Wisatawan Domestik	Jumlah	n/a	10,000	20,000	45,000	60,000	100,000		DISPARPORA, DIKJAR, MPD,MAG, SETDAKAB,
6	Meningkatkan peran lembaga keagamaan dalam tatanan kehidupan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan	Angka melanjutkan Sekolah pada jenjang perguruan tinggi	%	n/a	20	40	60	80	90	90	DISPENDAYAH, MPD,
		Angka Partisipasi Pendidikan Swasta	%	n/a	20	40	60	80	90	90	DISPENDAYAH, MPD,
		Angka Partisipasi TPA	%	0	5	10	15	20	25	30	DIKJAR, DISYAR, DISPENDAYAH
		ASN Khatam Qur'an 2x /Tahun	%	n/a	1	5	10	20	35	35	SEMUA OPD, ,
		Lembaga pendidikan non Formal yang bersertifikasi	%		30	40	50	60	70	70	DIKJAR, DISYAR, DISPENDAYAH
		Muatan Lokal	Jumlah	n/a	1	5	7	9	12	12	DIKJAR, MPD,MAG, DISPENDAYAH
		Pejabat Ess II hafizh 10 Juz	%	n/a	1	5	10	20	35	35	SEMUA OPD, ,

Sasaran		Indikator		kondisi Awal awal RPJM	Target Indikator					Kondisi akhir RPJM	OPD
		Outcome	Satuan		2018	2019	2020	2021	2022		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pejabat Ess III dan IV Hafizh 5 Juz	%	n/a	1	5	10	20	35	35	SEMUA OPD, ,
		Rencana Induk pembangunan Pendidikan	Jumlah	n/a		1					DIKJAR, MPD,MAG, DISPENDAYAH
7	Peningkatan Kualitas Keluarga yang islami	Angka Kekerasan Anak	Jumlah	n/a	<100	<75	<50	<25	<10	<10	DPPKBPA, DINSOS, DINSYAR
		AngkA Perceraian	Jumlah	n/a	<100	<75	<50	<25	<10	<10	DPPKBPA, DINSOS, DINSYAR
		kasus KDRT	Jumlah	22	<10	<10	<10	<10	<10	<10	DPPKBPA, DINSOS, DINSYAR
		Pendapatan Perkapita	Rp/Tahun	21	22	23	24	25	26	26	DPPKBPA, DINSOS, DINSYAR
Misi 2. Mewujudkan pelayanan prima sebagai wujud Reformasi Birokrasi											
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan terhadap masyarakat akan ditingkatkan dengan cara penatakelolaan kepemerintahan melalui pemerataan dan penempatan aparatur yang sesuai dengan kemampuan serta keahlian, penerapan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran, penerapan sistem penghargaan dan sanksi bagi aparatur, serta pelimpahan kewenangan dalam mewujudkan pelayanan prima bagi Masyarakat, sehingga akan terwujud efesiensi pelayanan secara terpadu.											
1	Mengurangi Mata Rantai Birokrasi	Indeks Kepuasan Layanan masyarakat	score	n/a	5	6	7	8	9	9	SEMUA SKPK, ,
		jumlah Qanun (Prolegda)	lumlah	n/a	5	5	5	5	5	5	DPMK, SETDAKAB, SETWAN
2	Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	ASN dengan sertifikasi Pengadaan Barang	Jumlah	n/a	10	20	35	40	60	60	SEMUA SKPK, ,
		ASN dengan sertifikasi Perencanaan	Jumlah	n/a	2	10	20	30	35	35	SEMUA SKPK, ,
		ASN dengan Sertifikat Keahlian	Jumlah	n/a	35	45	55	65	85	85	SEMUA SKPK, ,
		ASN Pendidikan S-2	Jumlah	n/a	20	35	50	60	120	120	SEMUA SKPK, ,
		ASN Pendidikan S-3	Jumlah	n/a	1	2	4	6	8	8	SEMUA SKPK, ,
		ASN yang sesuai dengan Analisis Jabatan	%	n/a	10	20	30	35	40	40	SEMUA SKPK, ,
		Indeks Kepuasan Layanan masyarakat	score	n/a	5	6	7	8	9	9	SEMUA SKPK, ,
		OPD dan Kampung yang tidak terdapat temuan yang berindikasi kerugian keuangan Negara/daerah	%	95	100	100	100	100	100	100	INSPEKTORAT, SETDAKAB, BAPPEDA
		Opini BPK	opini	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	SEMUA SKPK, ,
		Persentase aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang memiliki standart kompetensi	%	30 (2016)	40	50	60	70	90	90	INSPEKTORAT, ,
		Persentase Belanja Modal	%	n/a	35	45	55	60	65	65	BPKAD, BAPPEDA,
		Persentase OPD yang telah menginplementasikan SPIP	%	10	20	50	65	75	85	85	INSPEKTORAT, SETDAKAB, BAPPEDA
		Persentase Penilaian Sakip SKPK dengan Kategori "B"	%	n/a	20	30	40	80	85	85	SEMUA SKPK, ,
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	%	15 (2016)	20	35	50	65	75	75	INSPEKTORAT, SETDAKAB, BAPPEDA
		SOP pengawasan Internal	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1	INSPEKTORAT, SETDAKAB, BAPPEDA
3	Mewujudkan Birokrasi Efektif dan Efisien	ASN yang sesuai dengan Analisis Jabatan	%	n/a	10	20	30	35	40	40	BPPKD, SETDAKAB,
		Indeks Kepuasan Layanan masyarakat	score	n/a	5	6	7	8	9	9	SEMUA SKPK, ,
		jumlah Qanun (Prolegda)	Jumlah	n/a	5	5	5	5	5	5	BPPKD, SETDAKAB, SETWAN
		Persentase Belanja Modal	%	n/a	35	45	55	60	65	65	BPKAD, BAPPEDA,
		Program RPJM yang dijalankan pada APBK	%	n/a	90	90	95	100	100	100	BAPPEDA, ,
		Program RPJM yang dijalankan pada RKPD	%	n/a	90	90	95	100	100	100	BAPPEDA, ,
4	Mewujudkan Birokrasi Yang memiliki Pelayanan Publik yang berkualitas	APBA yang dialokasikan di Bener Meriah	M Rp	n/a	150	175	185	190	200	200	BAPPEDA, ,
		Indeks Kepuasan Layanan masyarakat	score	n/a	5	6	7	8	9	9	SEMUA SKPK, ,
		Jabatan Fungsional Perencana	Jumlah	n/a	2	10	20	30	35	35	BAPPEDA, BPPKD,
		Nilai APBN yang dialokasikan Ke Bener Meriah	M Rp	n/a	50	150	250	350	500	500	BAPPEDA, ,

Sasaran		Indikator		kondisi Awal awal RPJM	Target Indikator					Kondisi akhir RPJM	OPD
		Outcome	Satuan		2018	2019	2020	2021	2022		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penerimaan DAU	M Rp	457 (2016)	502.70	578.11	635.92	731.30	804.43	804.43	BAPPEDA, ,
		Pertumbuhan Ekonomi	%	5	5,2	5,4	5,5	5,7	5,8	5,8	BAPPEDA, , DINSOS, DIPARPORA, DISNAKERTRAN, DPUPR
		Program RPJM yang dijalankan pada APBK	%	n/a	90	90	95	100	100	100	BAPPEDA, ,
		Program RPJM yang dijalankan pada RKPD	%	n/a	90	90	95	100	100	100	BAPPEDA, ,
		Realisasi APBA yang dialokasikan di Bener Meriah (Doa, migas, apba dll)	M Rp	n/a	150	175	185	190	200	200	BAPPEDA, ,
		Realisasi Penerimaan DAK	M Rp	173 (2016)	175	180	185	190	195	195	BAPPEDA, ,
		Regulasi di kawasan Bencana	Jumlah	n/a	1	2	4	6	8	8	BAPPEDA, BPBD,
		Regulasi Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah	n/a	5	5	5	5	5	5	BAPPEDA, DINSYAR, SETDAKAB
Misi 3. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkeadilan											
Tujuan : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, sehingga membuka akses bagi masyarakat untuk menggerakan perekonomian masyarakat secara merata.											
1	Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur	Kawasan strategis	jumlah	1	2	5	8	10	12	12	DPUPERKIM, BAPPEDA, DISNAKETRAN
		Terlaksanakannya tindakan awal terhadap	5 Hari	n/a	5	5	5	5	5	5	DPUPERKIM, BAPPEDA, DLH
		Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	jumlah	n/a	2	2	4	8	8	8	DPUPERKIM, BAPPEDA, DLH
		Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	5 Hari	n/a	5	5	5	5	5	5	DPUPERKIM, BAPPEDA, DLH
		Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	DPUPERKIM, BAPPEDA, DLH
		Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	%	n/a	20	40	45	50	55	60	DPUPERKIM, BAPPEDA, DLH
2	Meningkatkan konektivitas bagi peningkatan daya saing	Jalan aspal	Km	709,77 (2016)	781	859	945	1,039	1,143	1,143	DPUPERKIM, ,
		Jembatan Kayu	%	14 (2016)	12	10	8	6	<2	<2	DPUPERKIM, ,
		Jumlah Jembatan	Jumlah	112 (2016)	118	123	130	136	143	143	DPUPERKIM, ,
		Panjang Jalan	km	1.126,84	1,239	1,362	1,499	1,649	1,813	1,813	DPUPERKIM, ,
		Tersedianya data base jalan dan jembatan yang dapat diakses publik	%	n/a	50	80	90	95	100	100	DPUPERKIM, BAPPEDA,
		Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	%	68.4 (2013)	70	75	80	85	90	90	DPUPERKIM, ,

Sasaran		Indikator		kondisi Awal awal RPJM	Target Indikator					Kondisi akhir RPJM	OPD
		Outcome	Satuan		2018	2019	2020	2021	2022		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	%	68.4 (2013)	70	75	80	85	90	90	DPUPERKIM, DPMK, DISNAKETRAN
		Tersedianya jalan yang menjamin Pengguna dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	%	77.9 (2016)	80	82	85	87	90	90	BPBD, DPUPERKIM,
		Tersedianya Jalan Yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	%	87 (2016)	90	92	94	96	98	98	DPUPERKIM, ,
3	Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar	Berkurangnya luasan permukiman kumuh	%	n/a	50	35	20	15	<10	<10	DPUPERKIM, DINSOS , BAITULMAAL
		Penerimaan Retribusi Sampah	M Rp	n/a	1	1.5	2	2.5	2.7	2.7	DPUPERKIM, DLH, DPMK
		Rumah Layak Huni	%	n/a	50	75	80	85	90	90	DPUPERKIM, DINSOS , BAITULMAAL
		Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	%	1.12 (2015)	100	100	100	100	100	100	DPUPERKIM, PDAM, DLH, DISNAKERTRAN, DPMK, DISPERINDAG
		Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari (sangatBuruk/Buruk/sedang/baik/sangat baik)	%	19.83 (2015)	40	60	80	90	100	100	DPUPERKIM, PDAM, DLH, DISNAKERTRAN, DPMK, DISPERINDAG
		Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	%	100 (2016)	100	100	100	100	100	100	DPUPERKIM, DLH, DPMK
		Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	%	n/a	10	40	60	80	90	90	DPUPERKIM, PDAM, DLH, DISNAKERTRAN, DPMK, DISPERINDAG
		Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	%	n/a	5	10	20	30	40	40	DPUPERKIM, PDAM, DLH, DISNAKERTRAN, DPMK, DISPERINDAG
		Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	%	n/a	50	60	70	80	90	90	DPUPERKIM, ,
		Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	%	70 (2016)	80	85	90	95	100	100	DPUPERKIM, DLH, DPMK
4	Meningkatkan infrastruktur dalam upaya dukungan kedaulatan pangan dan energi	kampung yang dialiri Listrik	Jumlah	150	200	232	232	232	232	232	DISPERINDAG, DISNAKERTRAN, DINSOS
		rumah tangga yang dialiri arus listrik	%	n/a	50	60	70	80	100	100	DISPERINDAG, DISNAKERTRAN, DINSOS
		Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	%	40.8 (2016)	50	60	70	80	85	85	DPUPERKIM, DISTAN,
		Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	%	68.4 (2013)	70	75	80	85	90	90	DISTAN, DISNAKERTRAN,
Misi 4. Mewujudkan tata kelola pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan											
Tujuan : Pengelolaan pertanian secara terpadu dan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil pertanian dan perkebunan secara terus menerus tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup petani.											

Sasaran		Indikator		kondisi Awal awal RPJM	Target Indikator					Kondisi akhir RPJM	OPD
		Outcome	Satuan		2018	2019	2020	2021	2022		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terpenuhinya aksesabilitas pada sentra produksi	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	%	68.4 (2013)	70	75	80	85	90	90	DPUPERA, DISNAKERTRAN, DISTAN, ,
2	Terjaganya keseimbangan supply dan demand agar tercipta tata kelola pertanian/perkebunan yang berkelanjutan	Kawasan strategis	jumlah	1	2	5	8	10	12	12	BAPPEDA, DPUPERA, DISNAKERTRAN
		Laboratorium Pertanian/Perkebunan	jumlah	n/a	1	2	3	4	5	5	BAPPEDA, , DISTAN, .
		Nilai tukar petani	Rasio	0.96 (2016)	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,8	DISTAN, , `
		PDRB Sektor Pertanian/Peternakan	Jt Rp	1,58 (2016)	1,59	1,60	1,65	1,70	1,8	1,8	DISTAN, , `
		Pendapatan Perkapita	Jt Rp/Thn	21	22	23	24	25	26	26	DISPERIDAG, , DISTAN, , `
		peningakatan Populasi Ternak	%	85 rb Ekor	10	10	10	10	10	10	DISTAN, ,
		peningkatan Nilai Export Komoditi	%	n/a	10	10	10	10	10	10	DISPERIDAG, DPM-PTSP, DISTAN, , `
		Peningkatan Produksi Daging	%	295 Ton/Thn (2016	10	10	10	10	10	10	DISTAN, ,
		Peningkatan Produktifitas Komoditi	%	5 (2016)	10	10	10	10	10	10	DISTAN, , `
		Pertumbuhan Ekonomi	%	5	5,2	5,4	5,5	5,7	5,8	5,8	BAPPEDA, DPUPERA, DISNAKERTRAN, DISPERIDAG, , DISTAN
3	Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan/peternakan	Laboratorium Pertanian/Perkebunan	jumlah	n/a	1	2	3	4	5	5	BAPPEDA, DISTAN
		Nilai tukar petani	Rasio	0.96 (2016)	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,8	DISTAN, ,
		PDRB Sektor Pertanian/Peternakan	Jt Rp	1,58 (2016)	1,59	1,60	1,65	1,70	1,8	1,8	DISTAN, ,
		peningkatan Nilai Export Komoditi	%	n/a	10	10	10	10	10	10	DISTAN, ,
		Peningkatan Produktifitas Komoditi	%	5 (2016)	10	10	10	10	10	10	DISTAN, ,
4	Peningkatan Kesejahteraan Petani dan pelaku usaha pertanian/perkebunan/peternakan	Angka Kemiskinan	%	21,45 (2016)	20	19	16	14	10	<10	DISTAN, ,
		investor	jumlah	5 (2016)	5	10	15	20	25	25	DPM-PTSP, DISPERINDAG,
		Jumlah IKM aktif									DISPERIDAG, DISKOPUKM,
		Jumlah Industri Agro	jumlah	n/a	1	5	10	15	20	20	DISPERIDAG, DISTAN,
		Jumlah UMKM	jumlah	1.010 (2016)	1061	1114	1169	1228	1289	1289	DISPERIDAG, DISKOPUKM, DINSOS, DISPARPORA
		Kontribusi PDRB sektor Industri	%	2,2 (2016)	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,2	DISPERIDAG, DISKOPUKM, DINSOS, DISPARPORA, DPM-PTSP,
		Nilai investasi	M Rp	n/a	500	1,000	1,500	2,000	2,500	2,500	DPM-PTSP, DISPERINDAG,
		Nilai tukar petani	Rasio	0.96 (2016)	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,8	DISPARPORA, DPM-PTSP, DISTAN, ,
		PDRB Sektor Pariwisata	%	0,43	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,60	DISPARPORA, DPM-PTSP,
		Pendapatan Perkapita	Jt Rp/Thn	21	22	23	24	25	26	26	DISPERIDAG, DISKOPUKM, DINSOS, DISPARPORA, DISTAN, ,
		peningakatan Populasi Ternak	%	85 rb Ekor (2016)	10	10	10	10	10	10	DISTAN, ,
		Peningkatan populasi Ikan	%	n/a	10	10	10	10	10	10	DISTAN, ,
		Peningkatan Produksi Daging	%	295 Ton/Thn (2016	10	10	10	10	10	10	DISTAN, ,
		Peningkatan Produktifitas Komoditi	%	5 (2016)	10	10	10	10	10	10	DISTAN, ,
		Pertumbuhan Ekonomi	%	5	5,2	5,4	5,5	5,7	5,8	5,8	DISPERINDAG, DPM-PTSP,
		Produksi Ikan	Ton	107,8 (2016)	118.6	130.4	143.5	157.8	173.6	173.6	DISTAN, ,
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,02 (2016)	1,1	1,0	0,9	0,85	0,8	0,8	DISPERIDAG, DISKOPUKM, DINSOS, DISPARPORA, DPM-PTSP,
		Wisatawan Asing	Jumlah	n/a	100	500	1,000	1,500	2,000	2,000	DISPARPORA, DPM-PTSP,
		Wisatawan Domestik	Jumlah	n/a	10,000	20,000	45,000	60,000	100,000	100,000	DISPARPORA, DPM-PTSP,
Misi 5. Mewujudkan pendidikan berkualitas dan berdaya saing											
Tujuan : Pendidikan yang berkualitas merupakan satu kesatuan antara tersedianya sarana dan prasarana yang layak, tenaga pendidik yang berkualitas serta penguatan dalam pembentukan karakter peserta didik, sehingga menghasilkan Sumber daya manusia yang memiliki daya saing dalam menghadapi era globalisasi											
1	Peningkatan Mutu dan	Angka rata rata Lama Sekolah	Tahun	9.42	9.5	10	10.5	11.5	12	12	, DISDIK, MPD

Sasaran	Indikator		Kondisi Awal awal RPJM	Target Indikator					Kondisi akhir RPJM	OPD
	Outcome	Satuan		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter	Lulusan Yang Melanjutkan Pada Perguruan Tinggi	%		45	55	65	75	85	85	, DISDIK, MPD
	Persentase SD/MI dan sederajat berakreditasi minimal B	%	56,95	60	70	75	80	85	85	, DISDIK, MPD
	Persentase SMP/MTs dan sederajat berakreditasi minimal B	%	54,93	60	70	75	80	85	85	, DISDIK, MPD
	Rata-rata Nilai UN	Nilai	SD (43,2) SMP (46,2) SMA (40,51)	SD (45) SMP (47) SMA (41)	SD (50) SMP (55) SMA (50)	SD (55) SMP (65) SMA (55)	SD (65) SMP (70) SMA (65)	SD (70) SMP (75) SMA (70)	SD (70) SMP (75) SMA (70)	, DISDIK, MPD
	SD Sederajat yang Memenuhi SPM	%		65	70	75	85	95	95	, DISDIK, MPD
	SMP sederajat Yang memenuhi SPM	%	n/a	65	70	75	85	95	95	, DISDIK, MPD
2 Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Angka Partisipasi Pendidikan Swasta	%	n/a	50	60	70	80	90	90	DISPENDAYAH, MPD,
	Angka Pengangguran	%	3,7	3	2.5	2	1.5	1	1	DISNAKERTRAN, DISDIK, MPD, DISPENDAYAH
	Angka Putus Sekolah	%	n/a	<1	<1	<1	<1	<1	<1	DISDIK, MPD, DISPENDAYAH,
	Angka rata rata Lama Sekolah	Tahun	9.42	9.5	10	10.5	11.5	12	12	DISDIK, MPD,
	APK PAUD	%	n/a	30	40	60	80	100	100	, DISDIK, MPD
	Guru Bersertifikasi	%	n/a	50	55	65	75	90	90	DISDIK, MPD, DISPENDAYAH,
	Guru dengan Pendidikan S2	%	jumlah	80	100	130	150	201	201	DISDIK, MPD, DISPENDAYAH,
	Guru Layak Mengajar	%	n/a	20	40	60	80	95	95	DISDIK, MPD, DISPENDAYAH,
	Guru PAUD Bersertifikasi	%	n/a	50	60	70	80	100	100	, DISDIK, MPD
	Lembaga pendidikan non Formal yang bersertifikasi	%	n/a	30	40	50	60	70	70	DISNAKERTRAN, DISDIK, MPD, DISPENDAYAH
	Lulusan SD sederajat yang memiliki sertifikat/ijazah Ula	%	n/a	10	30	60	80	90	90	DISPENDAYAH, MPD, DISDIK
	Lulusan SMP sederajat yang memiliki sertifikat/ijazah Wustho	%	n/a	10	30	60	80	90	90	DISPENDAYAH, MPD, DISDIK,
	Lulusan Yang Melanjutkan Pada Perguruan Tinggi	%	n/a	45	55	65	75	85	85	DISPENDAYAH, MPD, DISDIK,
	PAUD Bersertifikasi	%	n/a	30	40	60	80	100	100	, DISDIK, MPD
	Pendapatan Perkapita penduduk	Jt Rp/Thn	21	22	23	24	25	26	26	DISNAKERTRAN, DISDIK, MPD, DISPENDAYAH
	Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B	%	n/a	50	60	70	80	85	85	DISPENDAYAH, MPD, DISDIK,
	Persentase SD/MI dan sederajat berakreditasi minimal B	%	56,95	60	70	75	80	85	85	DISPENDAYAH, MPD, DISDIK,
	Persentase SMP/MTs dan sederajat berakreditasi minimal B	%	54,93	60	70	75	80	85	85	DISPENDAYAH, MPD, DISDIK,
	Rata-rata Nilai UN	Nilai	SD (43,2) SMP (46,2) SMA (40,51)	SD (45) SMP (47) SMA (41)	SD (50) SMP (55) SMA (50)	SD (55) SMP (65) SMA (55)	SD (65) SMP (70) SMA (65)	SD (70) SMP (75) SMA (70)	SD (70) SMP (75) SMA (70)	DISPENDAYAH, MPD, DISDIK,
	Ruang Kelas Baik	%	n/a	50	70	80	90	95	95	DISPENDAYAH, MPD, DISDIK,
	SD Sederajat yang Memenuhi SPM	%	56,95	60	70	75	80	85	85	DISDIK, MPD, DISPENDAYAH,
	Sekolah memenuhi SPM Pendidik dan Tenaga Pendidikan	%	20	40	60	80	85	95	95	BKPP, DISDIK
	SMP sederajat Yang memenuhi SPM	%	N/A	80	90	92	95	100	100	DISDIK, MPD, DISPENDAYAH,

Sasaran		Indikator		kondisi Awal awal RPJM	Target Indikator					Kondisi akhir RPJM	OPD
		Outcome	Satuan		2018	2019	2020	2021	2022		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Uji Kompetensi Guru	Nilai	SD (44,53) SMP (46,81) SMA (51,26)	SD (50) SMP (55) SMA (55)	SD (55) SMP (60) SMA (60)	SD (60) SMP (65) SMA (65)	SD (65) SMP (70) SMA (70)	SD (70) SMP (70) SMA (70)	SD (70) SMP (70) SMA (70)	DISDIK, MPD, DISPENDAYAH,
3	Percepatan Peningkatan Kesetaraan antar Lembaga Pendidikan	Lulusan SD sederajat yang memiliki sertifikat/ijazah Ula	%	n/a	10	30	60	80	90	90	DISDIK, MPD, DISPENDAYAH,
		Lulusan SMP sederajat yang memiliki sertifikat/ijazah Wustho	%	n/a	10	30	60	80	90	90	DISDIK, MPD, DISPENDAYAH,
		Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B	%	n/a	50	60	70	80	85	85	DISDIK, MPD, DISPENDAYAH,
		Persentase SMA/MA dan sederajat berakreditasi minimal B	%	52,78	60	70	75	80	85	85	DISDIK, MPD, DISPENDAYAH,
		Persentase SMP/MTs dan sederajat berakreditasi minimal B	%	54,93	60	70	75	80	85	85	DISDIK, MPD, DISPENDAYAH,
4	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul berbasis Life skill	Muatan Lokal Berbasis Lifeskill	Jumlah	n/a	1	5	7	9	12	12	DISNAKERTRAN, DISDIK, MPD, DISPENDAYAH,
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,02 (2016)	1,1	1,0	0,9	0,85	0,8	0,8	DISNAKERTRAN, DISDIK,
5	Peningkatan peran serta masyarakat pada sektor pendidikan	Angka Putus Sekolah	%	n/a	<1	<1	<1	<1	<1	<1	DISDIK, MPD, DISPENDAYAH,
Misi 6. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat											
Tujuan : Kesehatan merupakan bagian dari indikasi kesejahteraan, dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat menunjukan suatu kehidupan yang unggul											
1	Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan	ASN Sertifikasi Teknikal Medik	Jumlah	n/a	1	2	3	4	5	15	RSUDMK, PKM, DINKES
		Rasio Bidan Per 100rb	Rasio	240.9 (2016)	200	190	180	170	150	150	DINKES, BKPP, RSUDMK
		Rasio Dokter Ahli	Rasio	7.9 (2016)	6	6	6	6	6	6	DINKES, BKPP, RSUDMK
		Rasio Dokter Gigi	Rasio	10,7 (2016)	11	11	11	11	11	11	DINKES, BKPP, RSUDMK
		Rasio Dokter Per 1000	Rasio	34,3 (2016)	38	40	40	40	40	40	DINKES, BKPP, RSUDMK
		Rasio Perawat Per 100rb	Rasio	208.8 (2016)	200	190	180	170	150	150	DINKES, BKPP, RSUDMK
		SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	n/a	10	30	50	70	75	75	DINKES, BKPP, RSUDMK
2	Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat	Akreditasi RSU	*	3	5	5	5	5	5	5	RSUDMK, DINKES,
		cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100 (2016	100	100	100	100	100	100	DINKES, RSUDMK, PKM
		Cakupan Desa /kelurahan Universal child immunization (UCI)(dakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi >= 80%)	%	73,8 (2016)	75	80	85	90	95	95	DINKES, RSUDMK, PKM
		Cakupan Ketersediaan Obat dasar pada Fasilitas Pelayanan kesehatan Dasar (PKM, Poskesdes, RSU)	%	n/a	65	70	75	85	100	100	DINKES, RSUDMK, PKM
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	100 (2016)	100	100	100	100	100	100	DINKES, RSUDMK, PKM
		Cakupan kunjungan bayi	%	85.5 (2016)	87	90	93	95	98	98	DINKES, RSUDMK, PKM

Sasaran	Indikator		Kondisi Awal awal RPJM	Target Indikator					Kondisi akhir RPJM	OPD
	Outcome	Satuan		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 (mendapatkan Pelayanan Kehamilan Paling Sedikit 4 x sesuai standart)	%	91,7 (2016)	93	95	97	98	100	100	DINKES, RSUDMK, PKM
	Cakupan Neonatur (Bayi 0-28 hari) dengan komplikasi yang ditangani	%	100 (2016)	100	100	100	100	100	100	DINKES, RSUDMK, PKM
	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan oleh sarana	%	100 (2016)	100	100	100	100	100	100	DINKES, RSUDMK, PKM
	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan oleh sarana kesehatan	%	100 (2016)	100	100	100	100	100	100	RSUDMK, DINKES,
	Cakupan pelayanan ibu Nifas (masa 6 - 42 jam pasca persalinan)	%	90,32 (2016)	92	94	96	97	99	99	DINKES, RSUDMK, PKM
	Cakupan pelayanan Kelompok Inklusi	%	n/a	65	70	75	85	100	100	DINKES, RSUDMK, PKM
	Cakupan pelayanan Lansia	%	n/a	65	70	75	85	100	100	DINKES, RSUDMK, PKM
	cakupan pelayanan pemantauan tumbuh kembang anak balita (12-59 bulan)	%	86.9 (2016)	90	92	94	96	98	98	DINKES, RSUDMK, PKM
	Cakupan pelayanan Penderita diabetes Melitus	%	n/a	65	70	75	85	100	100	DINKES, RSUDMK, PKM
	Cakupan pelayanan Penderita Hipertensi	%	n/a	65	70	75	85	100	100	DINKES, RSUDMK, PKM
	Cakupan Pemberian Makanan Tamabahan ASI pada anak usia 6-24 bulan Keluarga miskin	%	0 (2016)	10	30	60	80	95	95	DINKES, RSUDMK, PKM
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Siswa kelas I SD sederajat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (Guru UKS/dokter kecil)	%	91.82 (2016)	92	94	96	98	99	99	DINKES, RSUDMK, PKM
	Cakupan Penderita DBD yang ditangani	%	100 (2016)	100	100	100	100	100	100	DINKES, RSUDMK, PKM
	Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	%	100 (2016)	100	100	100	100	100	100	DINKES, RSUDMK, PKM
	Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	%	100 (2016	100	100	100	100	100	100	DINKES, RSUDMK, PKM
	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompotensi kebidanan	%	90,8 (2016)	92	94	96	97	99	99	DINKES, RSUDMK, PKM
	Indeks Kepuasan Layanan masyarakat	score	n/a	5	6	7	8	9	9	DINKES, RSUDMK, PKM
	kasus Lahir stanting	Jumlah	n/a	<10	<10	<10	<10	<10	<10	DINKES, RSUDMK, PKM
	Penderita HIV/AIDS	Jiwa	n/a	<2	<2	<2	<2	<2	<2	DINKES, RSUDMK, PKM
	Puskesmas Terakreditasi	Jumlah	n/a	5	12	12	12	12	12	DINKES, ,
	Rasio Dokter Ahli	Rasio	7.9 (2016)	6	6	6	6	6	6	DINKES, BKPP, RSUDMK
	SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	n/a	10	30	50	70	75	75	DINKES, BKPP, RSUDMK
	Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah	n/a	1	2	4	4	4	4	DINKES, PKM, RSUD
	Type RSU	type	C	C	C	C	C	B	B	RSUDMK, DINKES,
3 Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Penemuan Acute Flasid Paralysis	Jumlah	0 (2016)	0	0	0	0	0	0	DINKES, RSUDMK, PKM, BKBPAPP
	Balita stanting	Jumlah	n/a	<10	<10	<10	<10	<10	<10	DINKES, PKM, BKBPAPP, DPMK

Sasaran	Indikator		kondisi Awal awal RPJM	Target Indikator					Kondisi akhir RPJM	OPD
	Outcome	Satuan		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cakupan desa /kelurahan mengalami kejadian luar biasa yang ditangani <24 Jam	%	0 (2016)	100	100	100	100	100	100	DINKES, PKM, BKBPAPP, DPMK
	Cakupan Desa /kelurahan Universal child immunization (UCI)(dakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi >= 80%)	%	73,8 (2016)	75	80	85	90	95	95	DINKES, RSUDMK, PKM, BKBPAPP, DPMK
	Cakupan Desa siaga Aktif	%	76.8 (2016)	80	85	90	95	100	100	DINKES, RSUDMK, PKM, BKBPAPP, DPMK
	Cakupan pelayanan Kelompok Inklusi	%	n/a	65	70	75	85	100	100	DINKES, PKM, DPMK
	Cakupan pelayanan Lansia	%	n/a	65	70	75	85	100	100	DINKES, PKM, DPMK
	Cakupan pelayanan Penderita diabetes Melitus	%	n/a	65	70	75	85	100	100	DINKES, PKM, DPMK
	Cakupan pelayanan Penderita Hipertensi	%	n/a	65	70	75	85	100	100	DINKES, PKM, DPMK
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Siswa kelas I SD sederajat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (Guru UKS/dokter kecil)	%	91.82 (2016)	92	94	96	98	99	99	DINKES, RSUDMK, PKM, BKBPAPP
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Siswa kelas I SD sederajat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (Guru UKS/dokter	%	91.82 (2016)	92	94	96	98	99	99	DINKES, PKM, BKBPAPP, DPMK
	Cakupan Penemuan Penderita Diare	%	100 (2016)	100	100	100	100	100	100	DINKES, PKM, BKBPAPP, DPMK
	Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan (BPJS, JKA)	%	n/a	100	100	100	100	100	100	DINKES, RSUDMK,
	Cakupan Peserta KB Aktif Pada Pasangan Usia Subur	%	71.3 (2016)	75	80	85	90	95	95	DINKES, RSUDMK, PKM, BKBPAPP
	Kasus Gizi Buruk	Jumlah	11 (2016)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	DINKES, PKM, BKBPAPP, DPMK
4 Meningkatnya Pengendalian Penyakit	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	n/a	<5	<5	<5	<5	<5	<5	DINKES, RSUDMK, PKM
	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	Rasio	52.9 (2016)	40	30	20	10	<10	<10	DINKES, ,
	Indeks Kepuasan Layanan masyarakat	score	n/a	5	6	7	8	9	9	DINKES, SETDAKAB, SETWAN
	jumlah Qanun (Prolegda)	Jumlah	n/a	5	5	5	5	5	5	DINKES, SETDAKAB, SETWAN
	Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun	%	n/a	<5	<5	<5	<5	<5	<5	DINKES, PKM,
5 Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan	Kasus Obat/Makanan mengandung Zat berbahaya dan Tidak Halal	Kasus	n/a	<1	<1	<1	<1	<1	<1	DINKES, DISPERINDAG, DLH
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan Poskesdes	%	n/a	100	100	100	100	100	100	DINKES, RSUDMK,
	Program RPJM yang dijalankan pada RKPD	%	n/a	90	90	95	100	100	100	DINKES, BAPPEDA,
6 Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi	Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah	n/a	1	2	4	4	4	4	DINKES, PKM,
Misi 7. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatkan yang harmonis										
Tujuan : Masyarakat Bener Meriah yang heterogen, memiliki potensi terhadap gesekan gesekan sehingga pentingnya prinsip menjaga harmoni dalam kehidupan yang berdampingan, serta menjamin keberadaan adat dan budaya yang berimbang, serta pemanfaatan sumber daya alam sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keberlanjutan kelestarian alam.										
1 Pengurangan angka	Angka Kriminalitas	%	0,03 (2016)	0,02	0,015	0,005	0,0025	0,0015	0,0015	SATPOL PP WH, KESBANGPOL,

Sasaran	Indikator		Kondisi Awal awal RPJM	Target Indikator					Kondisi akhir RPJM	OPD
	Outcome	Satuan		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
perceraian dan angka kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak terhadap penyakit masyarakat	Jumlah Perceraian	kasus	n/a	<100	<75	<50	<25	<10	<10	BPPKBPA, DINSOS, DPMK
	Kasus KDRT	Jumlah	7 (2017)	5	4	3	2	1	1	BPPKBPA, DINKES, DINSOS, ,
	Kasus Narkoba	Jumlah	30 (2016)	25	20	15	10	<10	<10	SATPOL PP WH, KESBANGPOL, DINSOS
	Pendapatan Perkapita	Jt Rp/Thn	21	22	23	24	25	26	26	BPPKBPA, DINSOS, DPMK
	Perselisihan Antar Warga	Jumlah	n/a	<5	<5	<5	<5	<5	<5	SATPOL PP WH, KESBANGPOL,
2 Penguatan lembaga dan organisasi kepemudaan, dan pemuda	Angka Kemiskinan	%	21,45 (2016)	20	19	16	14	10	<10	DISNAKERTRAN, ,
	jumlah Wirausaha muda (pengusaha Pemula)	Jumlah	n/a	10	50	100	150	200	510	DINSOS, DISNAKERTRAN, DISPERINDAG, DISKOPUKM, DISPARPORA
	Pendapatan Perkapita	Jt Rp/Thn	21	22	23	24	25	26	26	DINSOS, DISNAKERTRAN, DISPERINDAG, DISKOPUKM, DISPARPORA
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,02 (2016)	1,1	1,0	0,9	0,85	0,8	0,8	DINSOS, DISNAKERTRAN, DISPERINDAG, DISKOPUKM, DISPARPORA
3 Peningkatan prestasi olah raga dan seni	Event Olahraga	jumlah	n/a	2	6	8	10	15	15	DISPARPORA, ,
	Peringkat PORDA	Rangking	23 (2017)	<15	<15	<15	<15	<10	<10	DISPARPORA, ,
	Sarana Olah raga Raga	jumlah	n/a	10	50	100	150	233	233	DISPARPORA, ,
	Taman Budaya	Jumlah	n/a	1	2	5	10	11	11	DISPARPORA, MAG,
	wisatawan asing	jumlah	n/a	100	500	1000	1500	2000	2000	DISPARPORA, DPMPTSP,
	wisatawan domestik	jumlah	n/a	10000	20000	45000	60000	100000	100000	DISPARPORA, DPMPTSP,
4 Penguatan adat istiadat dan Kebudayaan	jumlah Qanun (Prolegda)	Jumlah	n/a	5	5	5	5	5	5	MAG, SETDAKAB, SETWAN
	Taman Budaya	Jumlah	n/a	1	2	5	10	11	11	DISPARPORA, MAG,
	wisatawan asing	jumlah	n/a	100	500	1000	1500	2000	2000	DISPARPORA, ,
	wisatawan domestik	jumlah	n/a	10000	20000	45000	60000	100000	100000	DISPARPORA, ,
5 Pengembangan Pemanfaatan Energi terbaharukan/Berkelanjutan,	Indeks Kepuasan Layanan masyarakat	score	n/a	5	6	7	8	9	9	DLH, , DPMK, DISNAKERTRAN,
	jumlah Qanun (Prolegda)	jumlah	n/a	5	5	5	5	5	5	DLH, SETDAKAB, SETWAN
	kasus ilegal logging	Jumlah	n/a	<10	<10	<10	<10	<10	<10	DLH, DPMPTSP, SATPOLPPWH
	Nilai investasi	M Rp	n/a	500	1000	1500	2000	2500	2500	DPMPTSP, DISPERINDAG,
	Peningkatan Persentase RTH	%	n/a	10	20	30	40	50	50	DLH, ,
	pertumbuhan PDRB Sektor Energi	%	0.14 (2016)	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1	DISPERIDAG, BAPPEDA,
	Produksi Daya Listrik	Mw	n/a	30	60	90	120	150	150	DISPERINDAG, DPMPTSP,
	Rasio Elektrivitas	%	n/a	90	92	94	96	98	100	DPUPERA, DPMK,
	rasio lahan vs sertifikat	%	n/a	10	20	30	40	50	50	DISPERTANAHAN, ,
6 Pelestarian dan pemanfaatan hutan berkelanjutan	deforestasi	rb Ha	n/a	10	20	40	80	100	250	DLH, DISPERINDAG, DPMPTSP
	kasus ilegal logging	Jumlah	n/a	<10	<10	<10	<10	<10	<10	DLH, SATPOL PPWH, DISPERINDAG, DPMPTSP
	Peningkatan Persentase RTH	%	n/a	10	20	30	40	50	50	DLH, ,
	Persentase Alih Fungsi Hutan	%	n/a	<5	<5	<5	<5	<5	<5	DLH, DISPERINDAG, DPMPTSP
	wisatawan asing	jumlah	n/a	100	500	1000	1500	2000	2000	DISPARPORA, DLH,
	wisatawan domestik	jumlah	n/a	10000	20000	45000	60000	100000	100000	DISPARPORA, DLH,
Misi 8. Mewujudkan perekonomian yang kuat, mandiri dan berkeadilan										
Tujuan : Merupakan upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki perekonomian yang kuat, mandiri dan berkeadilan										
1 Menggali sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah	Angka Kemiskinan	%	21,45 (2016)	20	19	16	14	10	<10	BAITUL MAAL, BPKAD,
	Indeks Kepuasan Layanan masyarakat	score	n/a	5	6	7	8	9	9	SEMUA OPD, ,
	Izin Yang dikeluarkan	Jumlah	n/a	1,000	2,000	4,000	6,000	8,000	21,000	SATPOL PP, DPM-PSP,
	jumlah Qanun (Prolegda)		n/a	5	5	5	5	5	5	SETDAKAB, SETWAN,
	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	SEMUA OPD, ,

Sasaran		Indikator		Kondisi Awal awal RPJM	Target Indikator					Kondisi akhir RPJM	OPD
		Outcome	Satuan		2018	2019	2020	2021	2022		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PAD	M Rp/tahun	66,5 (2016)	100	125	150	175	200	200	SEMUA OPD,,
		Penerimaan Retribusi izin	M Rp	3,9	5	10	15	20	25	25	SATPOL PP, DPM-PSP,
		Penerimaan Zakat	M Rp	8,2	10	15	20	25	30	30	BAITUL MAAL, BPKAD,
		Persentase aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang memiliki standart kompetensi	%	30 (2016)	40	50	60	70	90	90	INSPEKTORAT,,
		Persentase Belanja Modal	%	27,9	35	45	50	55	60	60	SEMUA OPD,,
		Regulasi Tentang Sumber PAD Baru	0	n/a	1	1	1	1	1	5	BAPPEDA, BPKAD, SETDAKAB
		Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kab/kota.	%	n/a	30	50	60	70	80	80	SATPOL PP, DPM-PSP,
2	Penguatan dan revitalisasi BUMD	Deviden BUMD	M	n/a	3	6	9	12	15	15	BUMD,,
		PAD	M Rp/tahun	66,5 (2016)	100	125	150	175	200	200	BUMD,,
3	Pengembangan Industri-industri dasar dalam upaya mengurangi rasio ketergantungan	Angka Kemiskinan	%	21,45 (2016)	20	17	15	13	10	10	DPMK, PEMERINTAHAN DESA, DISNAKERTRAN,,
		Angka Pengangguran	%	1,04 (2016)	1	1	1	1	1	1	DISDAG, DISKOP&UKM, DISNAKERTRAN,,
		Indeks Kepuasan Layanan masyarakat	score	n/a	5	6	7	8	9	9	DISDAG, DISKOP&UKM,
		Jumlah IKM aktif	Jumlah	n/a	10	20	30	40	50	50	DISDAG, DISKOP&UKM,
		Jumlah Industri Agro	Jumlah	n/a	1	5	10	15	20	20	DISDAG, DISTANPAN,
		Jumlah Investor	Jumlah	5 (2016)	7	10	15	20	25	25	DPM PST, DISDAG,
		jumlah Wirausaha muda (pengusaha Pemula)	orang	10	30	50	70	90	120	120	DISNAKERTRAN, DISPARPORA,
		Koperasi Aktif	%	45,8 (2016)	50	60	70	80	85	85	DISDAG, DISKOP&UKM,
		Nilai Investasi	Rp								DPM PST, DISDAG,
		One Village One Product	jumlah	n/a	10	50	100	200	233	233	DISDAG, DISKOP&UKM, DPMK
		PDRB sektor Industri	%	2,2 (2016)	2,25	2,3	2,4	2,5	3	3	DISDAG, DISKOP&UKM,
		Pendapatan Perkapita	jt Rp/thn	21	22	23	24	25	26	26	DISDAG, DISKOP&UKM, DISNAKERTRAN, DISPARPORA,
		Pertumbuhan UMKM	%	1010 UKM (jumlah)	10	10	10	10	10	1626 UMKM (jumlah)	DISDAG, DISKOP&UKM,
		rasio PAD Kampung thd pendapatan desa	%	n/a	20	30	35	45	50	50	DPMK, PEMERINTAHAN DESA,
		UMKM berlegalitas	%	n/a	10	20	30	50	80	80	DISDAG, DISKOP&UKM,

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

RKAWI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 135 TAHUN 2018
TANGGAL: 22 OKTOBER 2018 M
13 SHAFAR 1440 H

Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					kondisi kinerja Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
				K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	Pertumbuhan PDRB	%	n/a	10	20	30	40	50	50
2	Laju inflasi	%	n/a	5,4	5,6	5,6	5,5	5,5	5,5
3	PDRB per kapita	Jt Rp/Thn	21	22	23	24	25	26	26
4	Indeks Gini	%	n/a	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31
6	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indek	n/a	0,36	0,35	0,34	0,32	0,31	0,31
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	21,45	21,43	20	19	16	14	10
8	Rasio kesenjangan kemiskinan	%	3,30	3,2	3,1	2,5	2,0	1,5	1,5
10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	%	n/a	<1	<1	<1	<1	<1	<1
11	Indeks PembangunanManusia (IPM)	%	71,42	72	72,5	73,0	73,5	74,0	74,0
12	Angka melek huruf	%	98,81	99	99	99	99	99	99
13	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9,43	10	10,5	11	11,5	12	12
14	Angka usia harapan hidup	tahun	68,85	69	70	70,5	71	71,5	71,5
15	Persentase balita gizi buruk	%	n/a	<1	<1	<1	<1	<1	<1
16	Prevalensi balita gizi kurang	%	n/a	<1	<1	<1	<1	<1	<1
17	Cakupan Desa SiagaAktif	%	76.8 (2016)	80	85	90	95	100	100
18	Angka partisipasi angkatan kerja	%	64,26	65,41	65,80	66,19	66,57	66,96	66,96
19	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	64,26	65,41	65,80	66,19	66,57	66,96	66,96
20	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,7	3	2.5	2	1.5	1	1
23	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	n/a	100	100	100	100	100	100
27	Persentase PADterhadap pendapatan								
28	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1	Kesejahteraan Sosial								
1	Pendidikan								
	APK PAUD	%	n/a	30	40	60	80	100	100
	Aspek Pelayanan Umum								
1	Wajib								
1	pelayanan dasar								
1	Pendidikan								
	APK PAUD	%	n/a	30	40	60	80	100	100

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					kondisi kinerja Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
				K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
	Angka melanjutkan Sekolah pada jenjang perguruan tinggi	%	n/a	20	40	60	80	90	90
	Angka Partisipasi Pendidikan Swasta	%	n/a	60	70	75	80	85	85
	Angka Partisipasi TPA	%	0	5	10	15	20	25	30
	Angka Penganguran	%	3,7	3	2.5	2	1.5	1	1
	Angka rata rata Lama Sekolah	Tahun	9.42	9.5	10	10.5	11.5	12	12
	Guru Bersertifikasi	%	n/a	50	55	65	75	90	90
	Guru dengan Pendidikan S2	%	jumlah	80	100	130	150	201	201
	Guru Layak Mengajar	%	n/a	20	40	60	80	95	95
	Guru PAUD Bersertifikasi	%	n/a	50	60	70	80	100	100
	Lembaga pendidikan non Formal yang bersertifikasi	%	n/a	30	40	50	60	70	70
	Luiusan SD sederajat yang memiliki sertifikat/ijazah Ula	%	n/a	10	30	60	80	90	90
	Lulusan SMP sederajat yang memiliki sertifikat/ijazah Wustho	%	n/a	10	30	60	80	90	90
	lulusan Yang mampu Berusaha Sendiri	jumlah	n/a	300	400	500	700	1000	2900
	Muatan Lokal Berbasih Lifeskill	Jumlah	n/a	1	5	7	9	12	12
	PAUD Bersertifikasi	%	n/a	30	40	60	80	100	100
	Pendapatan Perkapita penduduk	Jt Rp/Thn	21	22	23	24	25	26	26
	Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B	%	n/a	50	60	70	80	85	85
	Persentase SD/MI dan sederajat berakreditasi minimal B	%	56,95	60	70	75	80	85	85
	Persentase SMA/MA dan sederajat berakreditasi minimal B	%	52,78	60	70	75	80	85	85
	Persentase SMP/MTs dan sederajat berakreditasi minimal B	%	54,93	60	70	75	80	85	85
	Rata-rata Nilai UN	Nilai	SD (43,2) SMP (46,2) SMA (40,51)	SD (45) SMP (47) SMA (41)	SD (50) SMP (55) SMA (50)	SD (55) SMP (65) SMA (55)	SD (65) SMP (70) SMA (65)	SD (70) SMP (75) SMA (70)	SD (70) SMP (75) SMA (70)
	Ruang Kelas Baik	%	60						
	SD Sederajat yang Memenuhi SPM	%		65	70	75	85	95	95
	SMP sederajat Yang memenuhi SPM	%	n/a	65	70	75	85	95	95
	Uji Kompetensi Guru	Nilai	SD (44,53) SMP (46,81) SMA (51,26)	SD (50) SMP (55) SMA (55)	SD (55) SMP (60) SMA (60)	SD (60) SMP (65) SMA (65)	SD (65) SMP (70) SMA (70)	SD (70) SMP (70) SMA (70)	SD (70) SMP (70) SMA (70)
	Pendidikan								
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								
	Angka partisipasi kasar	%	n/a	30	40	60	80	100	100
	Angka pendidikan yang ditamatkan	%	n/a	100	100	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Murni								
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	n/a	99	99	99	99	99	99

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					kondisi kinerja Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
				K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	n/a	99	99	99	99	99	99
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	n/a	99	99	99	99	99	99
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	n/a	99	99	99	99	99	99
	Angka partisipasi sekolah								
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	n/a	99	99	99	99	99	99
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	n/a	99	99	99	99	99	99
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	n/a	99	99	99	99	99	99
	Angka Putus Sekolah:								
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0	0	0	0	0	0
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0	0	0	0	0	0	0
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0	0	0	0	0	0	0
	Angka Kelulusan:								
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	n/a	99	99	99	99	99	99
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	n/a	99	99	99	99	99	99
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	n/a	99	99	99	99	99	99
	Angka Melanjutkan (AM):								
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	n/a	99	99	99	99	99	99
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	n/a	99	99	99	99	99	99
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	n/a	99	99	99	99	99	99
	Fasilitas Pendidikan:								
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	n/a	99	99	99	99	99	99
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	n/a	99	99	99	99	99	99
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar								
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah								
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	rasio	n/a	32	32	32	32	32	32
	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah			32	32	32	32	32	32
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar			32	32	32	32	32	32
	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata			32	32	32	32	32	32
	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar			100	100	100	100	100	100
	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	98,84	99	99	99	99	99	99

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					kondisi kinerja Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
				K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	98,84	99	99	99	99	99	99
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	n/a	70	80	85	90	90	90
2	Kesehatan								
	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	Rasio	52.9 (2016)	40	30	20	10	<10	<10
	Akreditasi RSU								
	Angka Penemuan Acute Flasid Paralysis (lumpuh Layu Mendadak) <15 Tahun	Jumlah	0 (2016)	0	0	0	0	0	0
	cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100 (2016	100	100	100	100	100	100
	Cakupan desa /kelurahan mengalami kejadian luar biasa yang ditangani <24 Jam	%	0 (2016)	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Desa /kelurahan Universal child immunization (UCI)(dakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi >= 80%)	%	73,8 (2016)	75	80	85	90	95	95
	Cakupan Desa siaga Aktif	%	76.8 (2016)	80	85	90	95	100	100
	Cakupan Ketersediaan Obat dasar pada Fasilitas Pelayanan kesehatan Dasar (PKM, Poskesdes, RSU)	%	n/a	65	70	75	85	100	100
	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	100 (2016)	100	100	100	100	100	100
	Cakupan kunjungan bayi	%	85.5 (2016)	87	90	93	95	98	98
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 (mendapatkan Pelayanan Kehamilan Paling Sedikit 4 x sesuai standart)	%	91,7 (2016)	93	95	97	98	100	100
	Cakupan Neonatur (Bayi 0-28 hari) dengan komplikasi yang ditangani	%	100 (2016)	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan oleh sarana kesehatan	%	100 (2016)	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan ibu Nifas (masa 6 - 42 jam pasca persalinan)	%	90,32 (2016)	92	94	96	97	99	99
	Cakupan pelayanan Kelompok Inklusi	%	n/a	65	70	75	85	100	100
	Cakupan pelayanan Lansia	%	n/a	65	70	75	85	100	100
	Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan								
	cakupan pelayanan pemantauan tumbuh kembang anak balita (12-59 bulan)	%	86.9 (2016)	90	92	94	96	98	98
	Cakupan pelayanan Penderita diabetes Melitus	%	n/a	65	70	75	85	100	100
	Cakupan pelayanan Penderita Hipertensi	%	n/a	65	70	75	85	100	100
	Cakupan Pemberian Makanan Tamabahan ASI pada anak usia 6-24 bulan Keluarga miskin	%	0 (2016)	10	30	60	80	95	95
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Siswa kelas I SD sederajat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (Guru UKS/dokter kecil)	%	91.82 (2016)	92	94	96	98	99	99
	Cakupan Penderita DBD yang ditangani	%	100 (2016)	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	%	100 (2016)	100	100	100	100	100	100

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					kondisi kinerja Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
				K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
4	Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman								
	Rumah Layak Huni	%	n/a	50	75	80	85	90	90
	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	%	n/a	50	35	20	15	<10	<10
	Kawasan strategis	jumlah	1	2	5	8	10	12	12
	Pertumbuhan Ekonomi	%	5	5,2	5,4	5,5	5,7	5,8	5,8
	Rumah Ibadah Yang menenuhi SPM	%	n/a	50	60	70	80	90	90
5	ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat								
	Angka Kemiskinan	%	21,43	20	19	16	14	10	11
	Angka Kriminalitas	%	0,03 (2016)	0,02	0,015	0,005	0,0025	0,0015	0,0015
	Angka Partisipasi TPA	%	0	5	10	15	20	25	30
	Iman Kampung Hafizh Qur'an	Jumlah	0	10	50	100	150	233	233
	Jumlah Event Dinul islam skala kabupaten	Jumlah	n/a	5	6	7	8	9	
	Jumlah Pelanggaran Syariat	Kasus	30 (2016)	25	20	15	10	5	5
	Kasus Narkoba	Jumlah	30 (2016)	25	20	15	10	<10	<10
	Penerimaan Zakat	Rp	8M	10	15	20	22	25	25
	Perselisihan Antar Warga	Jumlah	n/a	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	Rasio Tenaga Keagamaan per 1.000 penduduk	%	0	5	10	15	20	25	30
6	Sosial								
	Cakupan Alat Bantu penyandang cacat dan trauma	Jumlah	N/a	10	20	30	40	50	50
	Kasus KDRT	Jumlah	7 (2017)	5	4	3	2	1	1
	Kasus Narkoba	Jumlah	30 (2016)	25	20	15	10	<10	<10
	Perselisihan Antar Warga	Jumlah	n/a	<5	<5	<5	<5	<5	<5
2	Non Pelayanan Dasar / Fungsi Penunjang								
1	Tenaga Kerja								
	Pendapatan Perkapita	Jt Rp/Thn	21	22	23	24	25	26	26
	Angka Kekerasan Anak	Jumlah	n/a	<100	<75	<50	<25	<10	<10
	Angka Kemiskinan	%	21,45 (2016)	20	17	15	13	10	10
	Angka Pengangguran	%	1,04 (2016)	1	1	1	1	1	1
	kasus KDRT	Jumlah	22	<10	<10	<10	<10	<10	<10
	Pendapatan Perkapita	jt Rp/thn	21	22	23	24	25	26	26
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,02 (2016)	1,1	1,0	0,9	0,85	0,8	0,8
2	pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak								
	Angka Kekerasan Anak	Jumlah	n/a	<100	<75	<50	<25	<10	<10
	Jumlah Perceraian	kasus	n/a	<100	<75	<50	<25	<10	<10
	kasus KDRT	Jumlah	22	<10	<10	<10	<10	<10	<10
	Pendapatan Perkapita	Jt Rp/Thn	21	22	23	24	25	26	26
3	Pangan								
	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	%	68.4 (2013)	70	75	80	85	90	90
	Ketersediaan pangan utama	%	n/a	100	100	100	100	100	100
4	Pertanahan								
	Sertifikat Tanah	%	N/a	10	30	50	70	80	80

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					kondisi kinerja Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
				K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
	Cakupan Penemuan Penderita Diare	%	100 (2016)	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	%	100 (2016	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompotensi kebidanan	%	90,8 (2016)	92	94	96	97	99	99
	Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan (BPJS, JKA)	%	n/a	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Peserta KB Aktif Pada Pasangan Usia Subur	%	71.3 (2016)	75	80	85	90	95	95
	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat								
	Kasus Gizi Buruk	Jumlah	11 (2016)	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	kasus Lahir stanting	Jumlah	n/a	<10	<10	<10	<10	<10	<10
	Kasus Obat/Makanan mengandung Zat berbahaya dan Tidak Halal	Kasus	n/a	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	Penderita HIV/AIDS	Jiwa	n/a	<2	<2	<2	<2	<2	<2
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan Poskesdes	%	n/a	100	100	100	100	100	100
	Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun	%	n/a	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	PuskesdesTerakreditasi	%	n/a	10	30	60	70	85	85
	Puskesmas Terakreditasi	Jumlah	n/a	5	12	12	12	12	12
	Type RSU	type	C	C	C	C	C	B	B
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Rasio	7	0	0	0	0	0	0
	Angka kelangsungan hidup bayi	%	n/a	100	100	100	100	100	100
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Rasio	7	0	0	0	0	0	0
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Rasio	7	0	0	0	0	0	0
	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Rasio	n/a	0	0	0	0	0	0
	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio							
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio							
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	1	2	2	2	2	2	2
	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	n/a	100	100	100	100	100	100
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang								
	Jalan aspal	Km	709,77 (2016)	780.747	858.8217	944.70387	1039.174257	1143.091683	1143.091683
	Jembatan Kayu	%	14 (2016)	12	10	8	6	<2	<2
	Jumlah Jembatan	Jumlah	112 (2016)	117.6	123.48	129.654	136.1367	142.943535	142.943535
	Kawasan strategis	jumlah	1	2	5	8	10	12	12
	Panjang Jalan	km	1.126,84 (2016)	1238.6	1362.46	1498.706	1648.5766	1813.43426	1813.43426
	Pertumbuhan Ekonomi	%	5	5,2	5,4	5,5	5,7	5,8	5,8
	Rasio Elektrivitas	%	n/a	90	92	94	96	98	100
	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	5 Hari	n/a	5	5	5	5	5	5

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					kondisi kinerja Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
				K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
	Penerimaan BPTHTB	Jt RP/Tahun	N/a	1,000.00	1,250.00	1,562.50	1,953.13	2,441.41	2,441.41
	Penerimaan PBB	Jt RP/Tahun	500.00	1,000.00	1,250.00	1,562.50	1,953.13	2,441.41	2,441.41
	rasio lahan vs sertifikat	%	n/a	10	20	30	40	50	50
5	Lingkungan Hidup								
	Indeks Kepuasan Layanan masyarakat	score	n/a	5	6	7	8	9	9
	Penerimaan Retribusi Sampah	M Rp	n/a	1	1.5	2	2.5	2.7	2.7
	Peningkatan Persentase RTH	%	n/a	10	20	30	40	50	50
	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	%	100 (2016)	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	%	70 (2016)	80	85	90	95	100	100
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		n/a	100	100	100	100	100	100
	Cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran		n/a	100	100	100	100	100	100
	Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian		n/a	100	100	100	100	100	100
	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk		n/a	100	100	100	100	100	100
	Rasio bayi berakte kelahiran		n/a	100	100	100	100	100	100
	Rasio pasangan berakte nikah		n/a	100	100	100	100	100	100
	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		n/a	100	100	100	100	100	100
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		n/a	100	100	100	100	100	100
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		n/a	100	100	100	100	100	100
	Cakupan penerbitan akta kelahiran		n/a	100	100	100	100	100	100
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	Angka Kemiskinan	%	21,45 (2016)	20	17	15	13	10	10
	Indeks Kepuasan Layanan masyarakat	score	n/a	5	6	7	8	9	9
	Opini Terhadap Pengelolaan APBkampung	%		80	80	85	85	90	95
	PAD Kampung terhadap Pendapatan Kampung	%		75	77	80	85	85	90
	Pendapatan Perkapita	Jt Rp/Thn	21	22	23	24	25	26	26
	rasio PAD Kampung thd pendapatan desa	%	n/a	20	30	35	45	50	50
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	n/a	100	100	100	100	100	100
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	Cakupan Peserta KB Aktif	%	n/a	75	77	80	85	85	90
	Cakupan Peserta KB Baru	%	n/a	80	80	85	85	90	95
	Jumlah Perceraian	kasus	n/a	<100	<75	<50	<25	<10	<10
	kasus HIV/AIDS	kasus	n/a	<100	<75	<50	<25	<10	<5
	Kasus KDRT	Jumlah	7 (2017)	5	4	3	2	1	1
	Kasus Narkoba	kasus	n/a	<100	<75	<50	<25	<10	<10
	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	n/a	60	60	55	50	40	35
10	Komunikasi dan Informatika								

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					kondisi kinerja Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
				K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	jumlah	n/a	2	2	4	8	8	8
	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	5 Hari	n/a	5	5	5	5	5	5
	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	%	1.12 (2015)	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	%	40.8 (2016)	50	60	70	80	85	85
	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari (sangatBuruk/Buruk/sedang/baik/sangat baik)	%	19.83 (2015)	40	60	80	90	100	100
	Tersedianya data base jalan dan jembatan yang dapat diakses publik	%	n/a	50	80	90	95	100	100
	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	**ada/tidak**	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**
	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	**%**	**68.4 (2013)**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**	**90**
	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	**%**	**68.4 (2013)**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**	**90**
	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	**%**	**77.9 (2016)**	**80**	**82**	**85**	**87**	**90**	**90**
	Tersedianya Jalan Yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	**%**	**87 (2016)**	**90**	**92**	**94**	**96**	**98**	**98**
	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	**%**	**n/a**	**20**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**
	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	**%**	**n/a**	**10**	**40**	**60**	**80**	**90**	**90**
	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	**%**	**n/a**	**5**	**10**	**20**	**30**	**40**	**40**
	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	**%**	**n/a**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**90**
	Pekerjaan Umum:								
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	**%**	**n/a**	**50**	**70**	**80**	**85**	**90**	**90**

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					kondisi kinerja Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
				K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
	Jumlah Publikasi di media massa pertahun (Cetak dan Elektronik)	%	n/a	100	100	101	102	103	104
	Persentase pemanfaatan hosting dan collocation	%	n/a	75	80	85	85	90	90
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
	Pertumbuhan UMKM	%	1010 UKM (jumlah)	10	10	10	10	10	1626 UMKM (jumlah)
	Indeks Kepuasan Layanan masyarakat	score	n/a	5	6	7	8	9	9
	Jumlah IKM aktif								
	Jumlah UMKM	jumlah	1.010 (2016)	1061	1114	1169	1228	1289	1289
	jumlah Wirausaha muda (pengusaha Pemula)	Jumlah	n/a	10	50	100	150	200	510
	Kontribusi PDRB sektor Industri	%	2,2 (2016)	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,2
	Koperasi Aktif	%	45,8 (2016)	50	60	70	80	85	85
	One Village One Product	jumlah	n/a	10	50	100	200	233	233
	Pendapatan Perkapita	Jt Rp/Thn	21	22	23	24	25	26	26
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,02 (2016)	1,1	1,0	0,9	0,85	0,8	0,8
	UMKM berlegalitas	%	n/a	10	20	30	50	80	80
12	Penanaman Modal								
	Nilai investasi	M Rp	n/a	500	1000	1500	2000	2500	2500
	Jumlah Investor	Jumlah	5 (2016)	7	10	15	20	25	25
	Pertumbuhan Ekonomi	%	5	5,2	5,4	5,5	5,7	5,8	5,8
	Produksi Daya Listrik	Mw	n/a	30	60	90	120	150	150
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,02 (2016)	1,1	1,0	0,9	0,85	0,8	0,8
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	5 (2016)	7	10	15	20	25	25
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	5 (2016)	7	10	15	20	25	25
13	Kepemudaan dan Olah raga								
	Event Olahraga	jumlah	n/a	2	6	8	10	15	15
	Jumlah Organisasi Pemuda aktif	%		100	100	100	100	100	100
	jumlah Wirausaha muda (pengusaha Pemula)	Jumlah	n/a	10	50	100	150	200	510
	Kasus Narkoba	Jumlah	30 (2016)	25	20	15	10	<10	<10
	Pendapatan Perkapita	Jt Rp/Thn	21	22	23	24	25	26	26
	Peringkat POPDA	Rangking	23	<15	<15	<15	<15	<10	<10
	Peringkat PORDA	Rangking	23 (2017)	<15	<15	<15	<15	<10	<10
	Perselisihan Antar Warga	Jumlah		<100	<75	<50	<25	<10	<5
	Sarana Olah raga Raga	jumlah	n/a	10	50	100	150	233	233
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,02 (2016)	1,1	1,0	0,9	0,85	0,8	0,8
14	statistik *)								
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	n/a	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Buku "PDRB"	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
15	persandian *)								
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	n/a	100	100	100	100	100	100
16	Kebudayaan								

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					kondisi kinerja Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
				K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
	Jumlah Event Seni Budaya di Bener Meriah	jumlah	n/a	2	3	4	5	6	6
	Jumlah sanggar Seni dan Budaya	jumlah	n/a	2	4	6	8	10	10
	Situs Budaya Yg dibina	Jumlah	n/a	2	5	10	15	20	20
	Taman Budaya	Jumlah	n/a	1	2	5	10	11	11
17	Perpustakaan								
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	jumlah	n/a	1000	2000	4000	5000	6000	6000
18	Kearsipan								
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara	%	n/a	100	100	100	100	100	100
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	n/a	10	20	30	40	50	50
2	Pilihan								
1	Kelautan dan Perikanan								
	Peningkatan populasi ikan	%	n/a	10	10	10	10	10	10
	Produksi Ikan	Ton	107,8 (2016)	118.6	130.4	143.5	157.8	173.6	173.6
	Produksi Perikanan Darat	Ton	107,8 (2016)	118.6	130.4	143.5	157.8	173.6	173.6
2	Pariwisata								
	PDRB Sektor Pariwisata	%	0,43	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,60
	Pendapatan Perkapita	Rp/Tahun	21	22	23	24	25	26	26
	Wisatawan Asing	Jumlah		100	500	1,000	1,500	2,000	2,000
	Wisatawan Domestik	Jumlah	n/a	10,000	20,000	45,000	60,000	100,000	100,000
3	Pertanian								
	peningkatan Nilai Export Komoditi	%	n/a	10	10	10	10	10	10
	Angka Kemiskinan	%	21,45	21,43	20	19	16	14	10
	Laboratorium Pertanian/Perkebunan	jumlah	n/a	1	2	3	4	5	5
	Nilai tukar petani	Rasio	0.96 (2016)	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,8
	PDRB Sektor Pertanian/Peternakan	Jt Rp	1,58 (2016)	1,59	1,60	1,65	1,70	1,8	1,8
	Pendapatan Perkapita	Jt Rp/Thn	21	22	23	24	25	26	26
	peningakatan Populasi Ternak	%	85 rb Ekor (2016)	10	10	10	10	10	10
	peningkatan Nilai Export Komoditi	%	n/a	10	10	10	10	10	10
	Peningkatan Produksi Daging	%	295 Ton/Thn (2016	10	10	10	10	10	10
	Peningkatan Produktifitas Komoditi	%	5 (2016)	10	10	10	10	10	10
	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	%	68.4 (2013)	70	75	80	85	90	90
	Cakupan bina kelompok petani	%	n/a	100	100	100	100	100	100
4	kehutanan								
	Peningkatan Persentase RTH	%	n/a	10	20	30	40	50	50
	deforestasi	rb Ha	n/a	10	20	40	80	100	250
	kasus ilegal logging	Jumlah	n/a	<10	<10	<10	<10	<10	<10
	Peningkatan Persentase RTH	%	n/a	10	20	30	40	50	50
	Persentase Alih Fungsi Hutan	%	n/a	<5	<5	<5	<5	<5	<5
5	energi dan sumber daya mineral								
	rumah tangga yang dialiri arus listrik	%	n/a	50	60	70	80	100	100

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					kondisi kinerja Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
				K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
	kampung yang dialiri Listrik	Jumlah	150	200	232	232	232	232	232
	pertumbuhan PDRB Sektor Energi	%	0.14 (2016)	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1
6	perdagangan								
	Pendapatan Perkapita	Jt Rp/Thn	21	22	23	24	25	26	26
	peningkatan Nilai Export Komoditi	%	n/a	10	10	10	10	10	10
	Pertumbuhan Ekonomi	%	5	5,2	5,4	5,5	5,7	5,8	5,8
7	perindustrian								
	PDRB sektor Industri	%	2,2 (2016)	2,25	2,3	2,4	2,5	3	3
	Angka Pengangguran	%	1,04 (2016)	1	1	1	1	1	1
	Jumlah IKM aktif	Jumlah	n/a	10	20	30	40	50	50
	PDRB sektor Industri	%	2,2 (2016)	2,25	2,3	2,4	2,5	3	3
	Pendapatan Perkapita	jt Rp/thn	21	22	23	24	25	26	26
	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	n/a	100	100	100	100	100	100
8	transmigrasi								
	Angka Pengangguran	%	1,04 (2016)	1	1	1	1	1	1
	Pendapatan Perkapita	jt Rp/thn	21	22	23	24	25	26	26
	Persentase transmigran swakarsa								
3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
1	Administrasi Pemerintahan								
	Indeks Kepuasan Layanan masyarakat	score (1-10)	n/a		6	7	8	9	9
	jumlah Qanun (Prolegda)	Jumlah	n/a	5	5	5	5	5	5
2	Pengawasan								
	Persentase Penilaian Sakip SKPK dengan Kategori "B"	%	n/a	20	30	40	80	85	
	OPD dan Kampung yang tidak terdapat temuan yang berindikasi kerugian keuangan Negara/daerah	%	95	100	100	100	100	100	100
	Persentase OPD yang telah menginplementasikan SPIP	%	10	20	50	65	75	85	85
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	%	15 (2016)	20	35	50	65	75	75
	Persentase aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang memiliki standart kompetensi	%	30 (2016)	40	50	60	70	90	90
	SOP pengawasan Internal	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1
	Opini BPK	opini	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Izin Yang dikeluarkan	Jumlah	n/a	1,000	2,000	4,000	6,000	8,000	21,000
	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kab/kota.	%	n/a	30	50	60	70	80	80
	Penerimaan Retribusi izin	M Rp	3,9	5	10	15	20	25	25
	kasus ilegal logging	Jumlah	n/a	<10	<10	<10	<10	<10	<10
3	Perencanaan								
	Indeks Kepuasan Layanan masyarakat	score	n/a	5	6	7	8	9	9
	Jabatan Fungsional Perencana	Jumlah	n/a	2	10	20	30	35	35
	Kawasan strategis	jumlah	1	2	5	8	10	12	12
	Laboratorium Pertanian/Perkebunan	jumlah	n/a	1	2	3	4	5	5

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					kondisi kinerja Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
				K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
	PAD	M Rp/tahun	66,5 (2016)	100	125	150	175	200	200
	Persentase Belanja Modal	%	n/a	35	45	55	60	65	65
	Pertumbuhan Ekonomi	%	5	5,2	5,4	5,5	5,7	5,8	5,8
	Program RPJM yang dijalankan pada APBK	%	n/a	90	90	95	100	100	100
	Program RPJM yang dijalankan pada RKPD	%	n/a	90	90	95	100	100	100
	Realisasi APBA yang dialokasikan di Bener Meriah (Doa, migas,	M Rp	n/a	150	175	185	190	200	200
	Realisasi Penerimaan DAK	M Rp	173 (2016)	175	180	185	190	195	195
	Regulasi di kawasan Bencana	Jumlah	n/a	1	2	4	6	8	8
	Regulasi Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah	1	2	5	7	10	10	
	Regulasi Tentang Sumber PAD Baru	0	n/a	1	1	1	1	1	5
	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	jumlah	n/a	2	2	4	8	8	8
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	n/a	95	96	97	98	99	99
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	n/a	95	96	97	98	99	99
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	n/a	95	96	97	98	99	99
4	Keuangan								
	Persentase Belanja Modal	%	n/a	35	45	55	60	65	65
	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase Belanja Modal	%	27,9	35	45	50	55	60	60
	Persentase Penilaian Sakip SKPK dengan Kategori "B"	%	n/a	20	30	40	80	85	85
	Opini BPK	opini	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Opini BPK terhadap laporan keuangan								
	Persentase SILPA								
	Persentase SILPA terhadap APBD								
	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana								
	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	>10	>10	>10	>10	>10	>10
	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung								
	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa								

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					kondisi kinerja Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
				K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
	Penetapan APBD								
5	Kepegawaian								
	Rasio Dokter Ahli	Rasio	7.9 (2016)	6	6	6	6	6	6
	ASN dengan sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah	n/a	10	20	35	40	60	60
	ASN dengan sertifikasi Perencanaan	Jumlah	n/a	2	10	20	30	35	35
	ASN dengan Sertifikat Keahlian	Jumlah	n/a	35	45	55	65	85	85
	ASN Khatam Qur'an 2x /Tahun	%	n/a	5	10	15	20	25	25
	ASN Pendidikan S-2	Jumlah	n/a	20	35	50	60	120	120
	ASN Pendidikan S-3	Jumlah	n/a	1	2	4	6	8	8
	ASN Sertifikasi Teknikal Medik	Jumlah	n/a	1	2	3	4	5	15
	ASN yang sesuai dengan Analisis Jabatan	%	n/a	10	20	30	35	40	40
	Auditor Madya	Jumlah	n/a	10	15	20	25	35	35
	Auditor Utama	Jumlah	n/a	1	1	1	1	1	5
	Indeks Kepuasan Layanan masyarakat	score	n/a	5	6	7	8	9	9
	Pejabat Ess II hafizh 10 Juz	%	n/a	5	10	15	20	25	25
	Pejabat Ess III dan IV Hafizh 5 Juz	%	n/a	5	10	15	20	25	25
	Rasio Bidan Per 100rb	Rasio	240.9 (2016)	200	190	180	170	150	150
	Rasio Dokter Ahli	Rasio	7.9 (2016)	6	6	6	6	6	6
	Rasio Dokter Gigi	Rasio	10,7 (2016)	11	11	11	11	11	11
	Rasio Dokter Per 100©	Rasio	34,3 (2016)	38	40	40	40	40	40
	Rasio Perawat Per 100rb	Rasio	208.8 (2016)	200	190	180	170	150	150
	SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	n/a	10	30	50	70	75	75
	Sekolah memenuhi SPM Pendidik dan Tenaga Pendidikan	%	20	40	60	80	85	95	95
	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan								
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal								
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural								
	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah								
	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah								
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah								
22	Penelitian dan pengembangan								
	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	n/a	50	70	80	90	95	95
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	n/a	50	70	80	90	95	95
	Penerapan SIDa:								

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					kondisi kinerja Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
				K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	n/a	50	70	80	90	95	95
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	n/a	50	70	80	90	95	95
	Sekretariat Dewan								
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ad/tidak	n/a	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ad/tidak	n/a	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ad/tidak	n/a	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Aspek Daya Saing Daerah								
1	Kemampuan Ekonomi								
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	%	62,38	64,59	66,48	68,38	70,27	72,17	72,17
2	Nilai tukar petani	Indeks	96,26	96,64	97,52	97,81	98,00	99,35	99,35
10	Rasio ketergantungan	Indeks	35,26	35,16	35,06	34,96	34,86	34,77	34,77

Plt. BUPATI BENER MERIAH

SARKAWI